

## KSAL: Prajurit Satuan Tempur Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, prajurit satuan tempur menjadi prioritas dalam pemberian vaksinasi Covid-19.

Hal itu disampaikan KSAL ketika meninjau langsung serbuan vaksinasi Covid-19 di jajaran Korps Marinir di Lapangan Apel Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta, Senin (29/3).

"Serbuan vaksinasi Covid-19 di jajaran TNI AL khususnya di Korps Marinir ini dilaksanakan secara bertahap dan secepatnya," ujar KSAL dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (29/3).

"Kita utamakan prajurit yang operasional, yang berada di satuan-satuan tempur terlebih dahulu, hingga bertahap seluruh prajurit dapat tervaksin sesuai harapan pemerintah. Khusus untuk Nakes kita sudah 80 persen," katanya.

Pemberian vaksinasi Covid-19 kepada prajurit dan PNS Korps Marinir wilayah Jakarta ditargetkan mencapai 3.000 orang pada Senin

(29/3). Sementara, dari data per 26 Maret 2021, serbuan vaksin di lingkungan Korps Marinir mencapai lebih dari lima puluh persen atau 11.437 prajurit dari total keseluruhan 21.644 prajurit. Sementara yang belum disuntik 10.207 prajurit.

KSAL menyebut vaksinasi Covid-19 di lingkungan TNI sejauh ini terbilang lancar. "Untuk kegiatan vaksin di jajaran TNI AL relatif lancar dan aman. Dari total 21.000 prajurit dan Pegawai Negeri Sipil TNI AL yang telah divaksin, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIIPI yang serius tidak ada," kata KSAL.

Dalam peninjauan tersebut, KSAL didampingi Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Suhartono dan para Panglima atau Komandan Kotama TNI AL. Dalam peninjauan ini, KSAL beserta rombongan juga mengecek secara langsung proses pelaksanaan vaksin mulai dari registrasi, pengecekan data diri, tensi dan suhu, skining hingga pelaksanaan vaksin di tenda vaksinasi di Lapangan Apel Brigif 1 Marinir. ■ han

## Kedubes AS Kutuk Keras Aksi Bom Bunuh Diri di Makassar

JAKARTA (IM) - Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) mengutuk keras serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Minggu pagi kemarin.

Serangan terhadap jemaat yang sedang beribadah ini dianggap mencederai toleransi dan penghormatan atas keberagaman yang dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia.

Melalui pernyataan terkait serangan terhadap Gereja Katedral di Makassar, Kedubes AS mengatakan AS berdiri bersama rakyat Indo-

nesia. AS juga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Seperti diketahui sebuah ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di depan Gereja Katedral Makassar. Jumlah korban dilaporkan bertambah menjadi 19 orang.

Hingga saat ini, para korban baik luka ringan atau kritis telah menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Makassar seperti RS Si-loam. Laporan sementara, ada empat orang yang mengalami luka kritis. ■ mei



IDN/ANTARA

**AKSI SOLIDARITAS JURNALIS SURABAYA** Wartawan yang tergabung dalam Forum Jurnalis se-Surabaya membentangkan poster ketika aksi solidaritas jurnalis di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/3). Dalam aksinya, mereka mendesak agar kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan yang diduga dilakukan oknum aparat terhadap wartawan Tempo Nurhadi ketika melakukan peliputan terkait kasus dugaan suap pajak Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

## Di DPR, Komnas Perempuan Jelaskan Pentingnya RUU PKS

JAKARTA (IM) - Komisiner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengungkap alasan mengapa Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual betul-betul dibutuhkan.

"Kalau kita lihat dari KUHP, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Perlindungan Anak, Pengadilan HAM, UU Disabilitas, sampai PP nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Kita lihat bahwa definisi kekerasan seksual itu tidak ada," kata Siti dalam rapat dengar pendapat umum (RDP) Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Komnas Perempuan terkait RUU PKS, Senin (29/3).

Siti menjelaskan bahwa kekerasan seksual sudah disebut dalam UU PKDRT meski dalam lingkup domestik. Kemudian, kekerasan seksual juga ada di dalam PP Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, tetapi tanpa sanksi.

Lebih jauh, Siti menjelas-

kan soal perkosaan yang definisinya diatur dalam KUHP, UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak dengan lingkup yang terbatas. Ia mencontohkan di KUHP, definisi perkosaan adalah penetrasi penis ke vagina yang mengeluarkan sperma.

"Berarti perkosaan hanya diakui antara laki-laki terhadap perempuan. Padahal kasus-kasus yang kami hadapi, perkosaan tidak terbatas hanya penetrasi penis ke vagina, tapi juga penetrasi ke anus, penetrasi ke mulut, tidak hanya dengan menggunakan penis," ucap Siti. O-mei

Namun, Siti mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dikenakan perkosaan, melainkan diatur sebagai pencabulan. Padahal, ancaman pencabulan justru menjadi lebih rendah. Kemudian, untuk pemaksaan perkawinan juga tidak diatur dalam aturan undang-undang manapun. Hanya saja, ia menemukan pemaksaan perkawinan diatur dalam UU Perlindungan Anak, meski tanpa sanksi dan hanya di lingkup anak. ■ mei

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## ICW Minta KPK Mengusut Keterlibatan Dua Anggota DPR di Kasus Mantan Mensos Juliari

ICW menduga ada upaya dari internal KPK ingin menutup perkara suap bansos yang menjerat mantan Mensos Juliari Batubara, agar tidak merembet ke banyak pihak.

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki keterlibatan dua anggota DPR, Herman Heri dan Ihsan Yunus, dalam kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Penyelidikan semestinya dilakukan sebelum berkas kasus suap bantuan sosial (bansos) yang menjerat Juliari dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

"Pertama, memanggil Herman Herry, Ketua Komisi III DPR RI, sebagai saksi. Hal ini penting, sebab, dalam forum persidangan, saksi Adi Wahyono, telah menuturkan bahwa Herman mendapatkan satu juta paket pengadaan sembako," kata Peneliti ICW

Kurnia Ramadhan dalam keterangan tertulis, Senin (29/3).

Terkait Ihsan Yunus, ICW mengingatkan bahwa KPK baru menggeledah kediaman orangtua dan rumah pribadinya.

"Sedangkan ruangan kerja Ihsan sepertinya belum pernah didatangi oleh Penyidik," ujar Kurnia.

Menurut Kurnia, penanganan perkara suap bansos Kementerian Sosial di tingkat penyidikan menuai banyak problematika. Ia menduga, ada upaya dari internal KPK yang ingin menutup perkara ini agar tidak merembet ke banyak pihak.

"Melihat kondisi seperti ini, ICW menduga keras akan ada lagi nama-nama yang sen-

gaja dihilangkan dalam surat dakwaan Juliari Batubara nanti," ucapnya.

Seperti diketahui Juliari merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap bantuan sosial untuk Covid-19 di Wilayah Jabodetabek tahun 2020. Dalam kasus ini, KPK juga masih melakukan penyelidikan terhadap dua tersangka penerima suap, yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Sementara pemberi suap yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Mardana yang saat ini sudah berstatus terdakwa.

Harry Van Sidabukke yang berprofesi sebagai konsultan hukum didakwa menyuap Juliari, Adi, dan Matheus sebesar Rp1,28 miliar karena membantu penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude (MHS) sebagai penyedia bansos sembako Covid-19 sebanyak 1.519.256 paket.

Sedangkan Direktur Uta-

ma PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Mardana didakwa menyuap Juliari, Adi, dan Matheus senilai Rp1,95 miliar karena menunjuk Ardian melalui PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos sembako tahap 9, 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115.000 paket.

Atas perbuatannya, Harry dan Ardian dikenakan Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. ■ han

## KPU Sebut 9 dari 16 Daerah Punya Anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar rapat koordinasi dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota pada Minggu (28/3).

Komisisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, rapat tersebut membahas kesiapan KPU daerah melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

"Dukungan anggaran, selain mengenai rancangan tanggal hari H masing-masing daerah, kesiapan SDM (sumber daya manusia), rencana kerja teknis, dan lain-lain," kata Pramono dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/3).

Ia mengatakan, anggaran yang dibahas antara lain untuk kebutuhan menutup biaya honorarium badan ad hoc seperti PPK, PPS dan KPSS. Kemudian pengadaan dan distribusi logistik, bimbingan teknis atau pelatihan, sosialisasi, serta kelengkapan alat pelindung diri (APD).

"Berdasarkan data yang kami kumpulkan kemarin, didapatkan data bahwa sembilan daerah telah memiliki anggaran yang cukup untuk

melaksanakan PSU," ujarnya. "Anggaran tersebut berasal dari sisa hasil efisiensi yang dilakukan jajaran kami dalam mengelola anggaran hibah pmda yang tertuang dalam NPHD," kata Pramono.

Menurut Pramono, masih ada tujuh perkara sengketa pilkada yang kebutuhan anggaran untuk PSU melebihi sisa anggaran tersedia. Terkait daerah ini KPU sempat telah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dan DPRD masing-masing untuk mengajukan usulan anggaran tambahan.

"Untuk tujuh daerah ini, kami minta mereka untuk mengirim surat tembusan kepada KPU RI, sehingga KPU RI bisa melakukan komunikasi dan advokasi kepada Kementerian Dalam Negeri," kata Pramono.

Adapun Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan ada 16 perkara Sengketa hasil Pilkada 2020 yang harus melakukan PSU. Sidang putusan kami digelar pada Kamis (18/3) hingga Senin (22/3) dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman. ■ han

## Pengakuan Ibu dari Wanita Pelaku Bom Bunuh Diri Makassar

JAKARTA (IM) - EM, ibu kandung dari pelaku wanita bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, mengungkapkan sejumlah hal tentang putrinya. EM mengaku terkejut mengetahui bahwa anaknya terlibat aksi terorisme.

"Baru tahu tadi malam (kalau anak saya pelaku)," ucapnya, pada Senin (29/3).

EM ditemui wartawan saat memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan DNA di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Polisi hendak memastikan identitas pelaku bom bunuh diri. Usai pemeriksaan EM tak kuasa menahan tangis.

EM mengaku sudah jarang bertemu, sejak putrinya menikah. Sementara, pasutri pelaku bom bunuh diri tersebut menikah sekitar 7 bulan lalu.

"Sudah jarang (ketemu) selama menikah ini, biasa ji datang di rumah tapi jarang" ungkap EM kepada wartawan.

Sang ibu mengungkapkan, dalam keseharian, putrinya berjualan makanan secara online. Sementara suami putrinya, bertugas mengantar pesanan makanan.

"(Kesehariannya) jual online, makanan. Itu suaminya yang antar (pesanan makanan)," kata EM. ■ han

## KPK Lelang HP, Sepatu Hingga Tas, Rampasan dari 7 Terpidana Korupsi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan lelang barang rampasan negara atas nama 7 orang terpidana dalam perkara korupsi yang berbeda. Lelang dilakukan melalui tatap muka secara daring.

"KPK kembali akan melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan negara tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closed bidding) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III," ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (29/3).

Pelaksanaan lelang ini berdasarkan tujuh putusan Pengad-

dilan Tindak Pidana Korupsi berbeda untuk masing-masing terdakwa. Barang-barang yang dilelang, sejumlah handphone dari berbagai merek.

Selain HP, barang lain yang dilelang adalah sepatu pria dan wanita. Kudian kotak coklat berisikan tas merk Louis Vuitton bermotif kotak-kotak.

Lelang akan dilaksanakan pada Kamis, (1/4). Dengan batas akhir penawaran pukul 11.00 WIB (waktu server). Alamat domain di www.lelang.go.id dengan empat Lelang di KPKNL Jakarta III Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat. Dan untuk penetapan pemenang dilakukan setelah batas akhir penawaran. ■ mei

## PTUN Disebut Tak Berwenang Adili Surpres Omnibus Law

JAKARTA (IM) - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta atas gugatan YLBHI dkk. Alhasil, pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili Surat Presiden tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Kasus bermula saat Jokowi pertama kali mengumumkan proyek Omnibus Law dalam pidato usai dilantik menjadi Presiden RI 2019-2024. Tujuannya

adalah menyederhanakan undang-undang dan peraturan guna menggenjot investasi. Diharapkan, bisa menumbuhkan investasi sehingga menyerap tenaga kerja.

Namun dalam prosesnya, pembahasan rencana itu dinilai tertutup. Tiba-tiba saja muncul rancangan undang-undang (RUU) setebal seribu halaman lebih dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan Surat Presiden (Surpres) agar

RUU itu menjadi prioritas. Penolakan muncul di seantero negeri.

Atas hal itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan perorangan Merah Johansyah Ismail menggugat Surpres itu ke PTUN Jakarta.

Pada 19 Oktober 2020, ketua majelis Sutiyono dengan anggota Nelly Christian dan Enrico Simanjuntak menyatakan gugatan para pengadil tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Atas vonis itu, YLBHI dkk mengajukan banding. Apa kata PT TUN Jakarta?

"Menerima secara formal permohonan banding dari Pemanding/Penggugat I s.d. IV. terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/G/2020/PTUN. JKT. tanggal 19 Oktober 2020. Menguatkan Putusan Pen-

gadil Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/G/2020/PTUN. JKT. tanggal 19 Oktober 2020 yang dimohonkan banding oleh Pemanding/Penggugat I s.d. IV," demikian bunyi amar putusan yang dikutip dari website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Senin (29/3).

Duduk sebagai ketua majelis Sulisty dengan anggota Dani Elpah dan M Hussein Rozarius.

"Menghukum Pemanding/Penggugat I s.d. IV. untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250 ribu," ujar majelis.

Lalu bagaimana dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja? DPR mengesahkan pada awal Oktober 2020. Kini UU itu sudah berlaku efektif dan puluhan Peraturan Pemerintah (PP) UU Cipta Kerja sudah diundangkan. ■ han



## KASAL TINJAU VAKSINASI COVID-19 DI KORPS MARINIR

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) didampingi Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono (kedua kanan) berfoto dengan jajaran usai meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Markas Korps Marinir, Cilandak, Jakarta, Senin (29/3). Pencapaian vaksinasi di satuan Korps Marinir sebanyak 14.437 orang dari jajaran prajurit dan PNS.

### PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan pemegang saham PT. ANCORA SPORTS, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") merencanakan mengalihkan sebagian besar saham dalam Perseroan kepada pembeli yang ditentukan oleh para pemegang saham.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) dan ayat (8) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), para kreditor Perseroan yang berkeberatan atas rencana pengalihan sebagian besar saham tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini ke alamat Perseroan disertai alasan dan bukti-bukti pendukung untuk itu ke alamat sebagai berikut :

**PT. ANCORA SPORTS**

Up. Direksi

Sudirman Plaza, Plaza Marein, Lantai 11 Unit D, Jl. Jend Sudirman Kav. 76-78 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12190

Jakarta, 30 Maret 2021

Direksi Perseroan